



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SILATURAHMI BERSAMA PRESIDEN

MEMPERKUAT DAYA TAHAN
EKONOMI NASIONAL DI TENGAH
GELOMBANG PERANG TARIF
PERDAGANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

Menteri Keuangan Republik Indonesia



Jakarta, 8 April 2025



Outline

- 1** Pergeseran Geopolitik: *Multilateral towards Unilateral*
- 2** Kebijakan Tarif Perdagangan AS
- 3** Resiliensi Perekonomian Indonesia
- 4** Kinerja Fiskal



DUNIA BERUBAH, GEOPOLITIK MENGIKIS MULTILATERALISME, PROTEKSIONISME NAIK, NEGARA MAKIN DOMINAN DALAM EKONOMI & SOSIAL

Institusi multilateral global melemah



Sistem multilateral

Unilateral dan intervensi aktif negara



Kemunduran kerja sama ekonomi

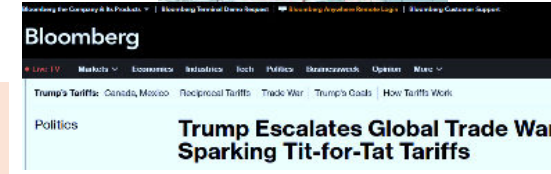
- G7 goyah vs BRICS menguat
- Ketidadaan konsensus dalam kebijakan ekonomi global

Kebijakan inward looking

- Geostrategi
- Proteksionisme

Keruntuhan rules-based trading system

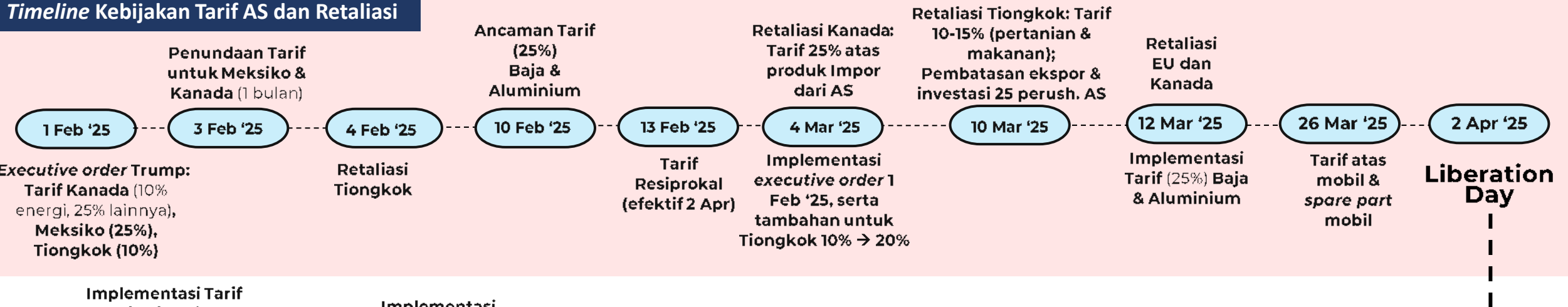
- Praktik *friendshoring*, *nearshoring*
- Blok dagang berbasis Kawasan
- Negosiasi bilateral (*bilateral deal-making principle*)
- Aksi unilateral dan retaliasi
- Peningkatan *dispute* di WTO





KEBIJAKAN TARIF AS MENJADI SUMBER RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN AKUT TERHADAP EKONOMI DAN KEUANGAN GLOBAL

Timeline Kebijakan Tarif AS dan Retaliasi



Treatment pada Indonesia

Komoditas paling terdampak
Mesin/Peralatan Elektrik, Pakaian dan Aksesoris Rajutan, Alas Kaki, dan Pakaian dan Aksesoris Non-Rajutan.

Tariff Charged to The US:

64%

Reciprocal Rate:

32%

Window untuk dialog dan diplomasi:

- Akomodatif a.l. melalui *nontariff barrier* dan perluasan investasi ; atau
- **Offensive** dengan tarif balasan (*last option*), menunggu perkembangan 9 April 2025)



TARIF Resiprokal AS atas 60 Negara

Negara	Tarif Resiprokal
Lesotho	50
Saint Pierre and Miquelon	50
Cambodia	49
Laos	48
Madagascar	47
Vietnam	46
Sri Lanka	44
Myanmar (Burma)	44
Falkland Island	41
Syria	41
Mauritius	40
Iraq	39
Guyana	38
Liechtenstein	37
Reunion	37
Bangladesh	37
Serbia	37
Botswana	37
Thailand	36
Bosnia and Herzegovina	35

Negara	Tarif Resiprokal
China	34
North Macedonia	33
Taiwan	32
Indonesia	32
Angola	32
Fiji	32
Switzerland	31
Moldova	31
Libya	31
Algeria	30
Nauru	30
South Africa	30
Norfolk Island	29
Pakistan	29
Tunisia	28
Kazakhstan	27
India	26
South Korea	25
Japan	24
Malaysia	24

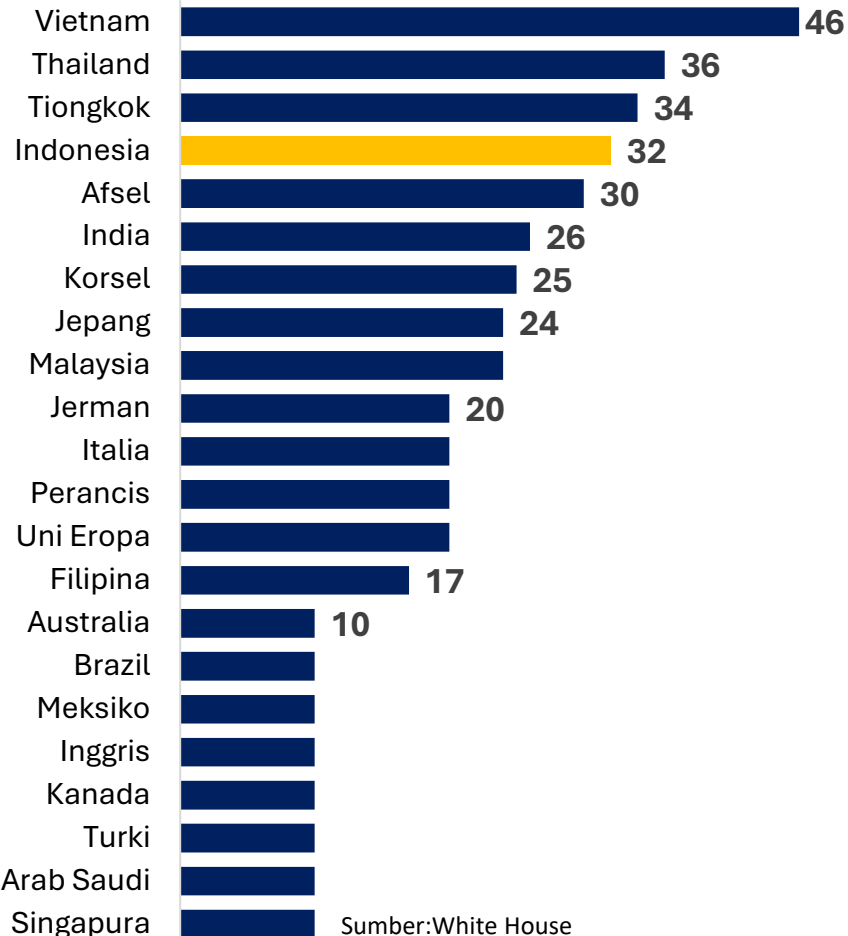
Negara	Tarif Resiprokal
Brunei	24
Vanuatu	22
Cote d'Ivoire	21
Namibia	21
Jordan	20
European Union	20
Nicaragua	18
Zimbabwe	18
Israel	17
Zambia	17
Philippines	17
Malawi	17
Mozambique	16
Norway	15
Venezuela	15
Nigeria	14
Equatorial Guinea	13
Chad	13
Congo	11
Cameroon	11



KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AS DI RESPONS BERAGAM, MENAMBAH KETIDAKPASTIAN

Mayoritas negara memilih jalur negosiasi, arah perdagangan global semakin tidak pasti

Tarif Resiprokal AS pada Negara ASEAN & G20 (%)



Negara besar cenderung retaliasi, sementara lainnya memilih jalur negosiasi

Negara	Jenis Respons	Langkah yang Diambil
Tiongkok	Retaliasi	Menerapkan tarif balasan (34%) atas produk AS; restriksi ekspor & investasi ke AS
Uni Eropa	Retaliasi	Mengancam <i>countermeasures</i> jika negosiasi dengan AS tidak berhasil
Kanada	Retaliasi	Mengumumkan <i>countermeasures</i> berupa tarif atas produk AS
India, Jepang, Meksiko, Korsel, Brazil, Thailand, Australia, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura		Pendekatan diplomatic / negosiasi



Risiko pada Pertumbuhan Ekonomi Global





Trade Diversion: Peluang dan Tantangan

Peluang *take over* porsi ekspor dari:

1. Vietnam (tarif: 46%)
2. Bangladesh (37%)
3. Thailand (36%)
4. China (34)

Ancaman daya saing ekspor dari:

1. Filipina (tarif: 17%)
2. Malaysia (24%)
3. Korea Selatan (25%)
4. India (26%)

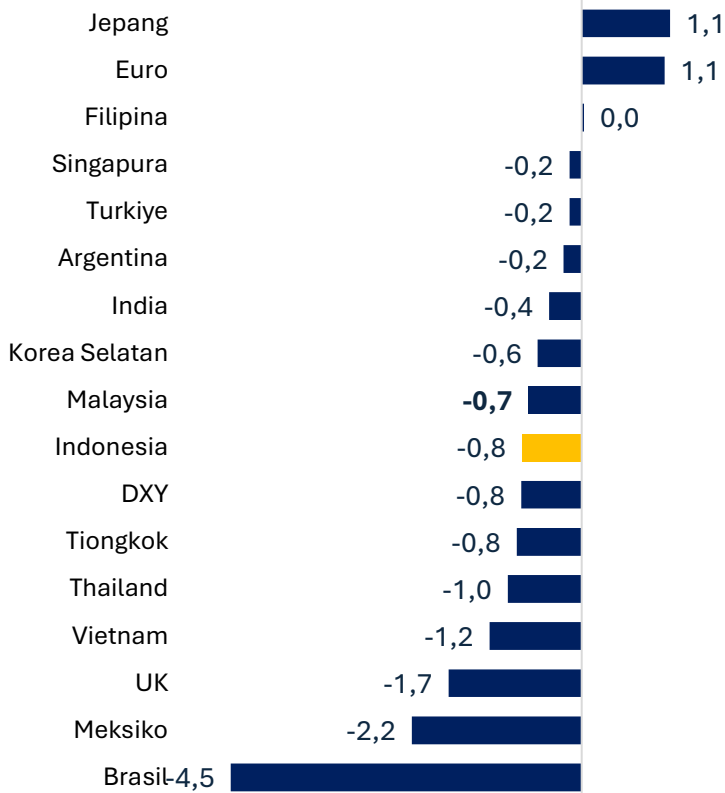
No.	Sektor	Komoditas	Negara (Peluang)	Negara (Ancaman)
1.	Tekstil dan Produk Garmen	Pakaian jadi, kaus, sepatu olahraga	Vietnam, Bangladesh, China	India
2.	Elektronik dan Komponen	Semikonduktor, peralatan listrik, suku cadang elektronik	China, Vietnam,	Korsel
3.	Alas Kaki dan Produk Kulit	Sepatu kulit, sandal, sepatu olahraga	Vietnam, China	India
4.	Produk Kayu dan Furnitur	Mebel kayu, produk rotan, panel kayu	China, Vietnam	Malaysia
5.	Karet dan Produk Karet	Ban kendaraan, sarung tangan karet	Thailand, Vietnam	Malaysia
6.	Makanan dan Minuman Olahan	Produk ikan olahan, mi instan, kopi instan	Thailand, Vietnam	Filipina
7.	Produk Perikanan	Udang, tuna, kepiting olahan	Vietnam, Thailand	India
8.	Otomotif dan Suku Cadang	India (26%)	Thailand, Jepang, Meksiko	Jepang & Meksiko
9.	Produk Logam dan Baja	Baja, aluminium, nikel	Tiongkok, Korea Selatan	India



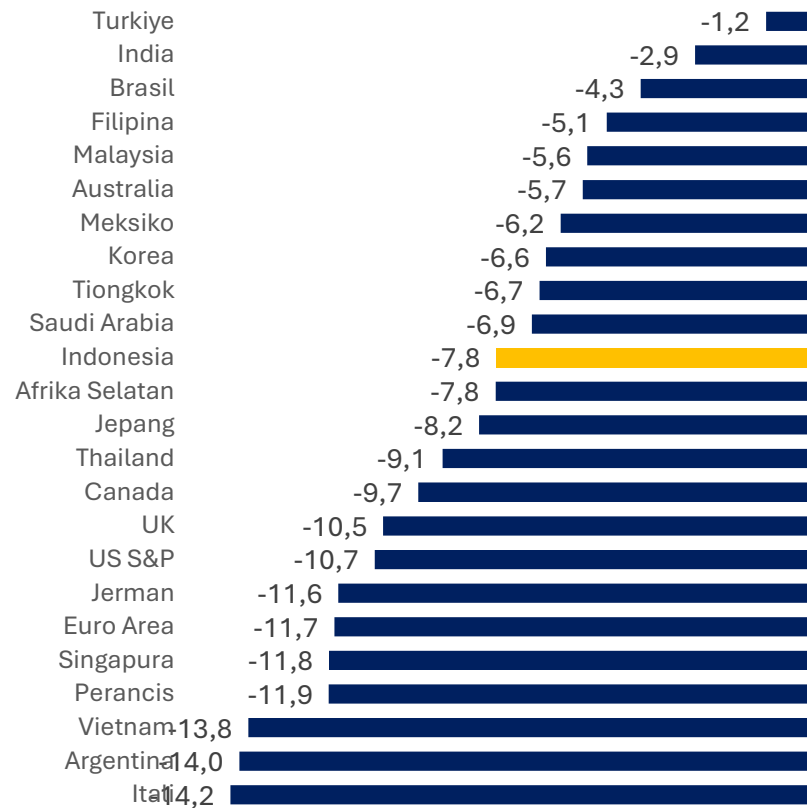
INVESTOR PORTOFOLIO MERESPONS NEGATIF KEBIJAKAN TARIF AS

- Pasar global anjlok akibat tarif AS dan retaliasi Tiongkok, mendorong alih investasi ke *safe haven assets*.
- Karena diumumkan saat libur Lebaran, risiko koreksi pasar dan pelemahan rupiah perlu diantisipasi

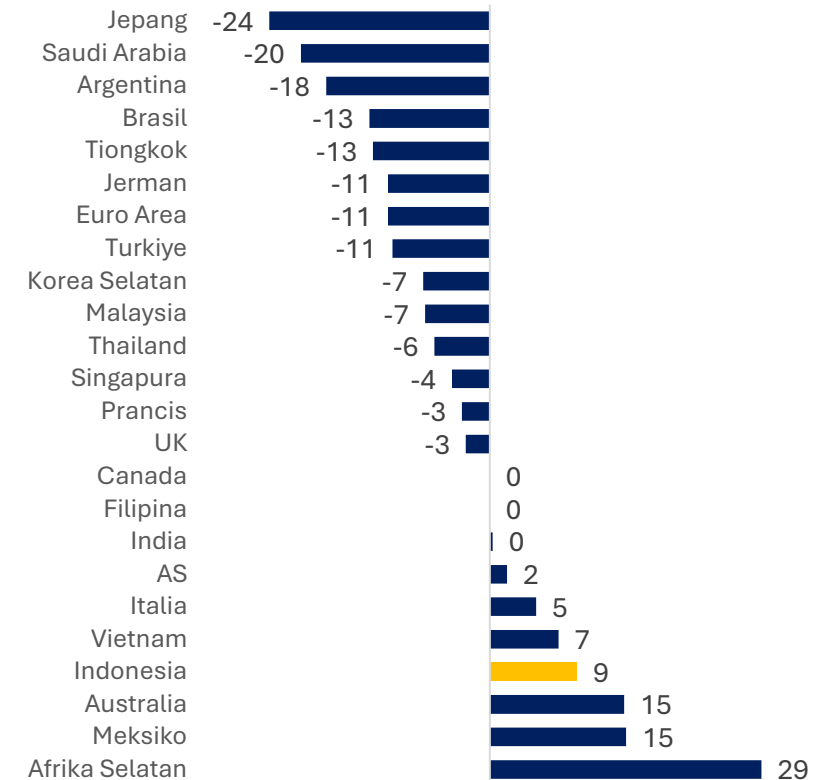
Nilai Tukar (%)
per 8 April thd 2 April 2025



Indeks Harga Saham (%)
per 8 April thd 2 April 2025



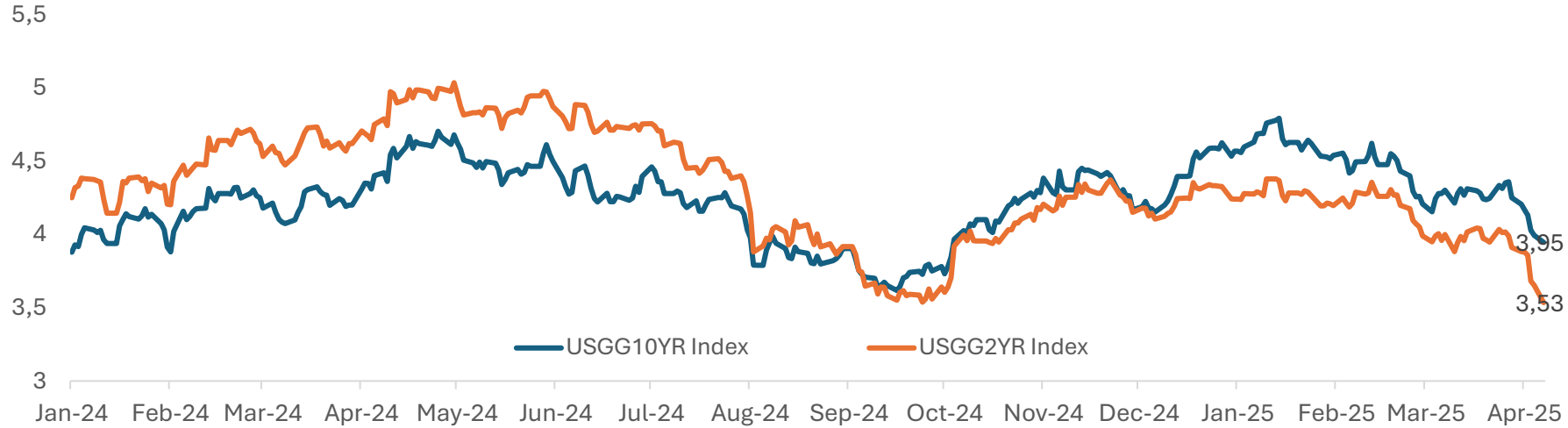
Obligasi Negara (bps)
per 8 April thd 2 April 2025



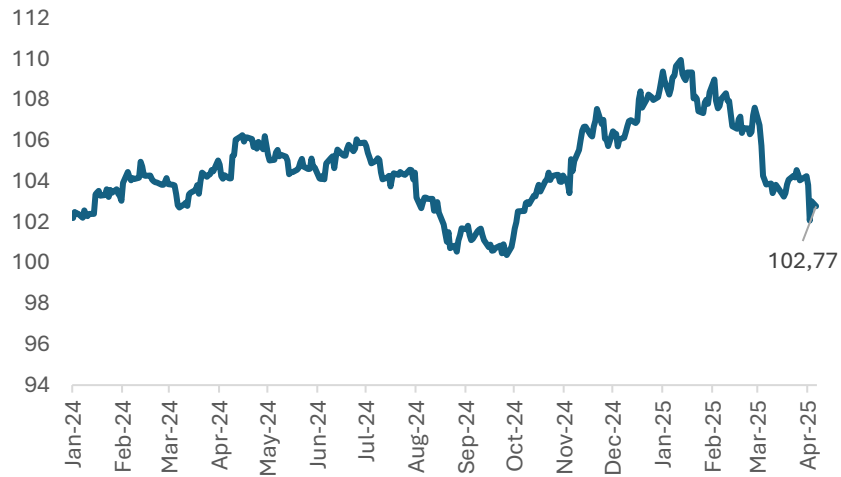


TEKANAN DI PASAR KEUANGAN SEMAKIN TINGGI SEPEKAN TERAKHIR

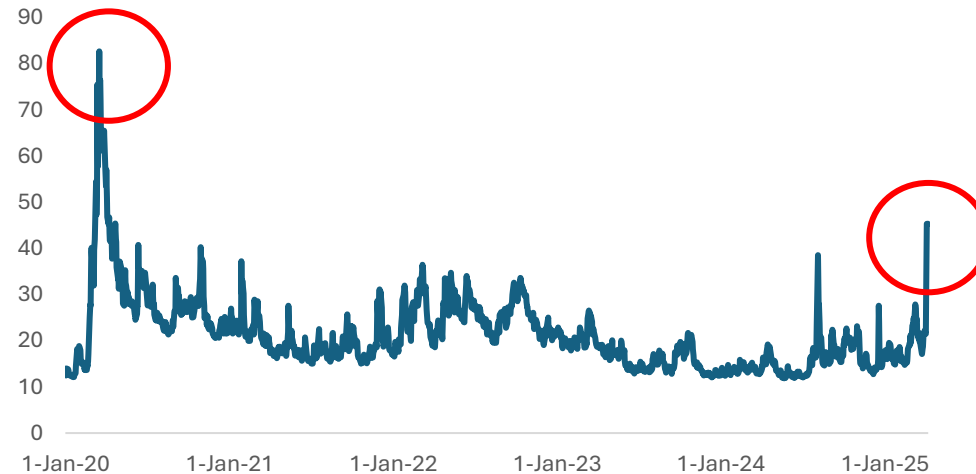
UST 10 Y vs UST 2Y



DXY Index



VIX Index



Yield UST 10Y dan 2Y cenderung terus turun. Investor mencari tempat yang aman di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa perang dagang.

J.P.Morgan menyatakan kenaikan peluang resesi ekonomi global naik menjadi sebesar 60% dari 40% sebelumnya. S&P Global, Goldman juga menaikkan peluang terjadinya resesi AS.

Indeks Dolar AS cenderung terus menurun dan VIX Indeks mencapai level tertinggi setelah pandemi Covid-19.



KEBIJAKAN TARIF AS MENEKAN HARGA BERBAGAI KOMODITAS

Harga CPO, Tembaga, dan Nikel sempat Naik hingga Maret, Lalu Terkoreksi Usai Tarif Trump

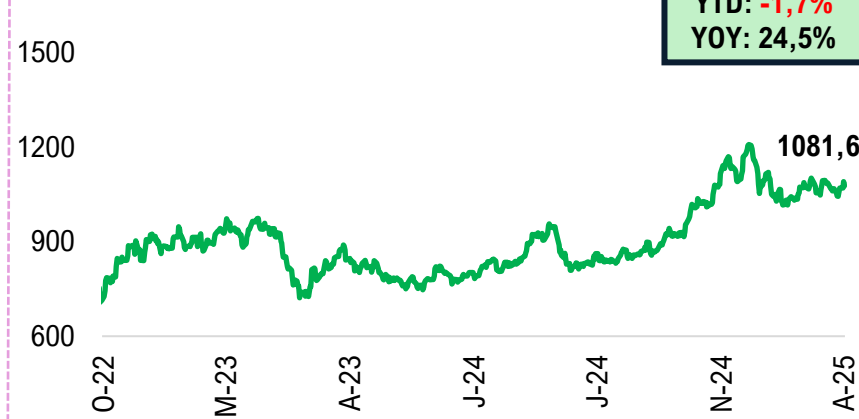
HARGA KOMODITAS ENERGI

Coal (US\$/Metric Ton)



HARGA KOMODITAS PANGAN

CPO (US\$/Ton)

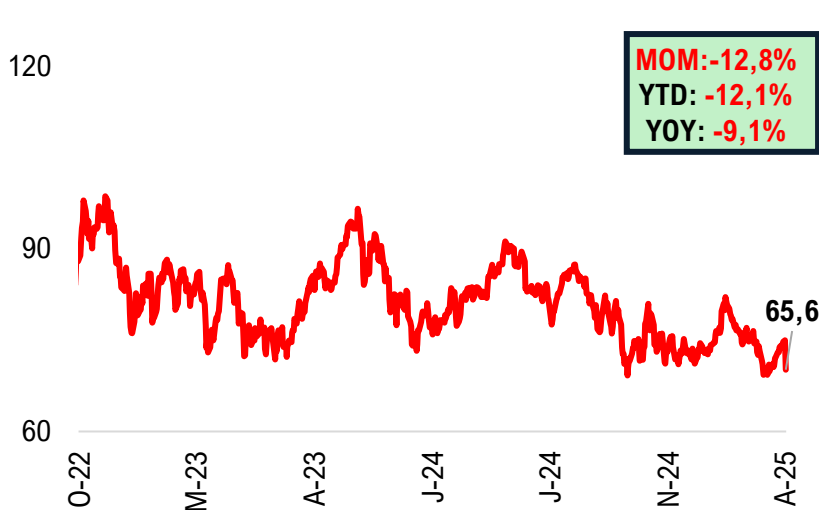


HARGA KOMODITAS MINERAL LOGAM

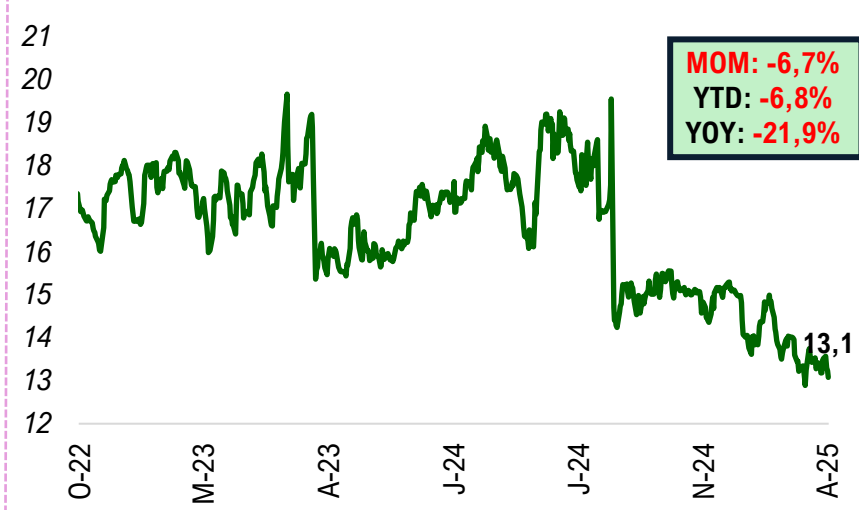
Copper (US\$/MT)



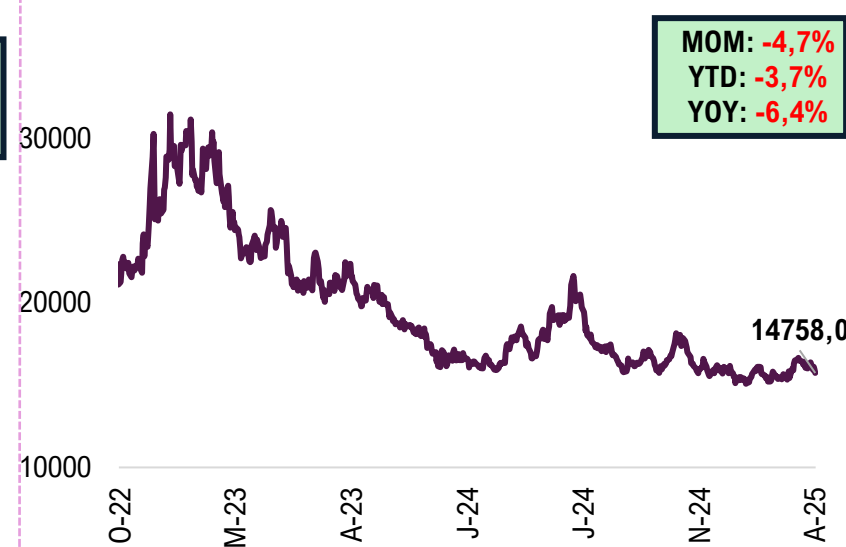
Brent (US\$/barrel)



Rice (US\$/cwt)



Nickel (US\$/MT)

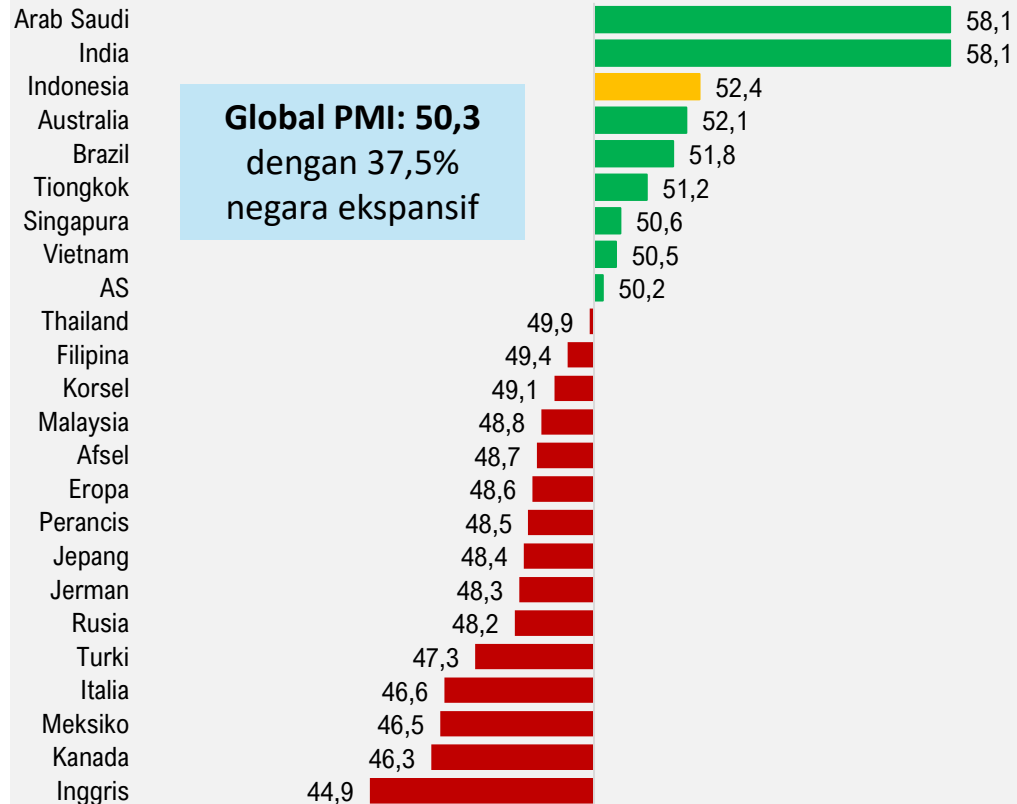




BERSAMA GLOBAL, AKTIVITAS MANUFAKTUR INDONESIA MELANJUTKAN EKSPANSI, BERDAMPAK POSITIF PADA AKTIVITAS PERDAGANGAN

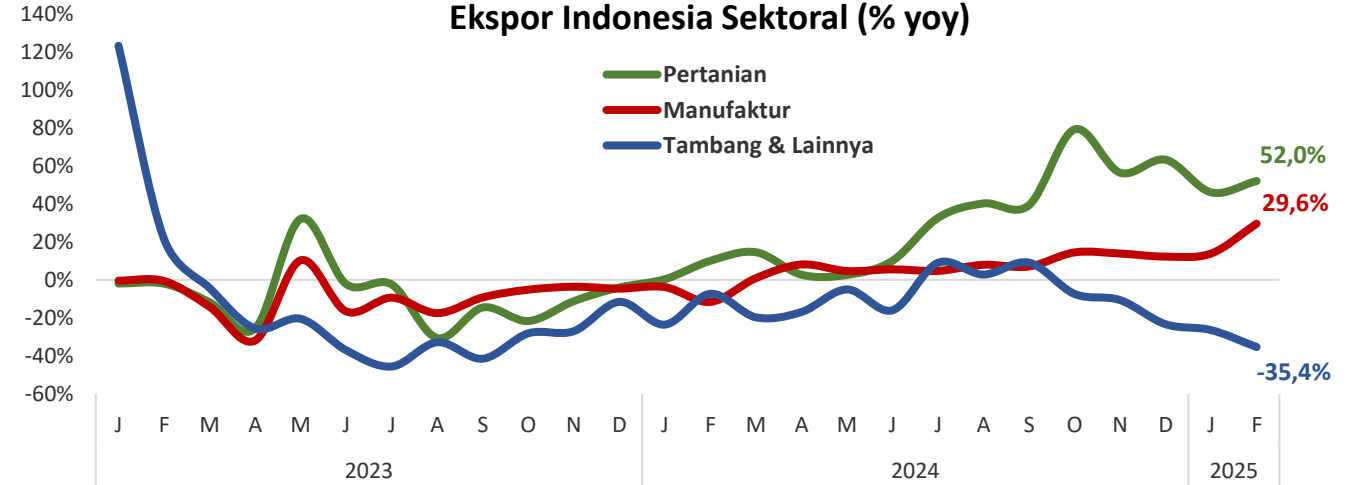
Berlanjutnya hilirisasi turut mendorong pertumbuhan ekspor sektor manufaktur, mengompensasi penurunan ekspor tambang dengan **ekspor bernilai tambah lebih tinggi**

Distribusi PMI Manufaktur bulan Maret 2025 negara G20 dan ASEAN-6 (minus ARG)

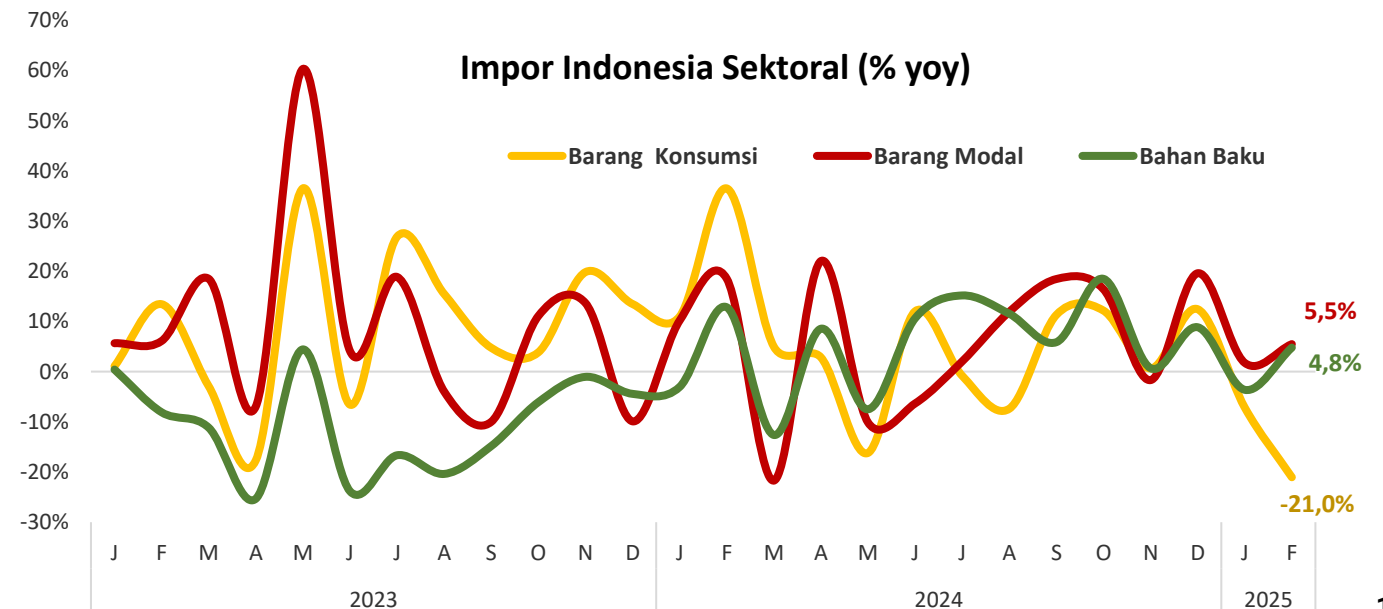


Sumber: Bloomberg, IHS Markit

Ekspor Indonesia Sektoral (% yoy)



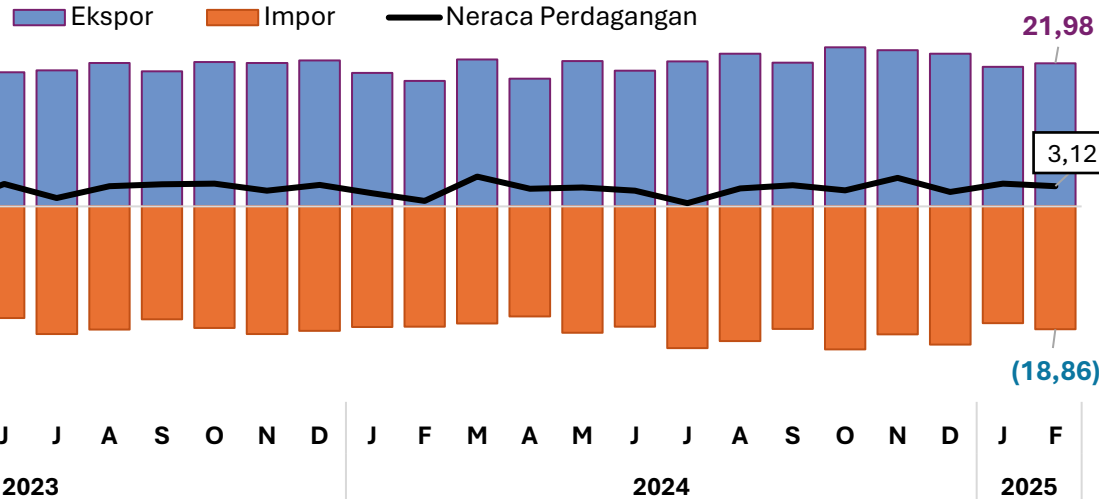
Impor Indonesia Sektoral (% yoy)





NERACA PERDAGANGAN MASIH KUAT NAMUN RISIKO KENAIKAN TARIF AS TERUS DIWASPADAI DAN DIANTISIPASI

Neraca Perdagangan Indonesia (USD Miliar)



10 Negara Tujuan Ekspor Indonesia (USD Miliar)

NEGARA	2023	2024	% (YoY)
CHINA	64,9	62,4	-3,9%
USA	23,3	26,3	13,2%
JEPANG	20,8	20,7	-0,4%
INDIA	20,3	20,3	0,2%
MALAYSIA	12,5	12,0	-3,5%
KOREA SELATAN	10,3	10,8	4,4%
FILIPINA	11,0	10,7	-2,7%
SINGAPURA	12,6	12,2	-3,2%
TAIWAN	6,7	6,7	-0,3%
VIET NAM	7,5	9,5	25,7%
TOTAL 10 NEGARA	189,9	191,7	0,9%
TOTAL EKSPOR	258,8	264,7	2,3%
SHARE 10 NEGARA	73,4%	72,4%	

AS negara tujuan ekspor terbesar ke-2 (USD 26,3 bio)
menjadi sumber risiko bagi Indonesia

Langkah mitigasi Pemerintah:

- Negosiasi untuk penurunan tarif, terutama melalui deregulasi.
- Mengoptimalkan potensi *trade diversion*.





DEREGULASI PAJAK DAN KEPABEANAN MEMUDAHKAN DUNIA USAHA (1)

IMPLEMENTASI CORETAX

Coretax:

- layanan perpajakan dan restitusi otomatis
- **percepatan waktu proses pemeriksaan dan proses keberatan**
- **sistem validasi yg terhubung dengan instansi lain** utk mempercepat layanan.

PERCEPATAN PEMERIKSAAN PAJAK

(PMK 15 tahun 2025 tgl 10 Feb 2025)

- Untuk jangka waktu pemeriksaan dipersingkat 50% dari **12 bulan** menjadi **6 bulan**
- Pemeriksaan WP Grup dan *Transfer Pricing* semula maksimum 24 bulan diubah menjadi 10 bulan.

PENYEDERHANAAN PROSES RESTITUSI PAJAK

(PMK No. 119 Tahun 2024)

- a. **WP OP dengan nilai Lebih Bayar Pajak Penghasilan ≤ Rp100 juta** diberikan pengembalian tanpa pemeriksaan, **pengurangan sanksi** dalam hal saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran pajak.
- b. Per 1 Jan 2025 penelitian dan validasi **pengembalian Lebih Bayar PPN** otomatis oleh *coretax*

PENETAPAN NILAI PABEAN

Menggunakan sistem **Price Range** (rentang harga) berbasis bukti valid.

FASILITASI AKTIVITAS IMPOR

Penghapusan kuota impor dan peraturan teknis (pertek)



DEREGULASI PAJAK DAN KEPABEANAN MEMUDAHKAN DUNIA USAHA (2)

PENYEDERHANAAN PERIJINAN DAN TATA NIAGA IMPOR:

- a. **Perbaiki proses perizinan berbasis data sesuai *supply- demand*.**
- b. **Pergeseran pengawasan dari border ke *post border*.** Pengawasan **di *border*** hanya untuk barang/bahan terkait Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan (K3L).

IMPLEMENTASI HICO X-RAY BERBASIS AI:

Memperkuat pengawasan kepabeanan non-intrusive di pelabuhan laut dan bandara. Pengembangan sistem berbasis AI ini akan mengoptimalkan analisis hasil pemindaian.

NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM (NLE):

NLE berbasis digital lintas KL, menurunkan biaya logistic dengan memudahkan mempercepat dan akuntabel/transparan. Mencakup 53 pelabuhan dan 7 bandara.

KEBIJAKAN LAINNYA:

- a. **Harmonisasi kebijakan dan administrasi** perpajakan kepabeanan atas aktivitas impor dan ekspor. Memperhatikan keselarasan kebijakan hulu dan hilir, dan meminimalkan restitusi.
- b. **Perbaiki proses kerja** terkait kebijakan perlindungan perdagangan untuk mendukung daya saing pelaku usaha (*trade remedies*).
- c. **Fasilitasi aktivitas impor** dg meminimalkan persyaratan kuota maupun perijinan teknis



FISCAL MEASURES DAN DEREGULASI TAX-CUSTOMS

No	Measures	Instrumen	Keterangan/Tindakan	Tariff
1.	Administrasi Perpajakan dan Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Pajak2. Restitusi Pajak3. Perijinan dan Pengawasan Ekspor/Impor4. dll	<p>Percepatan Proses Pemeriksaan (Maret 2025), Penyederhanaan Restitusi (Februari 2025)</p> <p>Kemudahan Perijinan dan Pengawasan Border (Januari 2025)</p>	Equivalen dengan 2%
2	Kebijakan Perpajakan	Penyesuaian Tarif PPh Impor	Penyesuaian Tarif PPh Impor untuk Produk Tertentu (Elektronik, Seluler, Laptop)	2,5 ke 0,5% (equivalen 2%)
3	Penyesuaian Tarif BM Produk Impor	Penyesuaian Tarif BM semua Produk AS (MFN)	Produk2: Besi Baja, Alkes, ITA, Produk Pertambangan, Produk turunan Besi Baja	5-10% ke 0-5% (equivalen dengan 5%)
4	Penyesuaian Tarif Bea Keluar CPO	Penyesuaian Tarif BK untuk CPO	Penyesuaian Bea Keluar Produk Sawit bervariasi 0% s.d. 25%	Equivalen dengan 5%
5	Trade Remedies	Percepatan Proses Penerbitan Kebijakan Trade Remedies	Trade Remedies (BM-AD, Imbalan, Safeguarding) dipercepat dari 30 ke 15 hari	



POSTUR APBN 2025 TETAP SESUAI UU APBN NO. 62 TAHUN 2024

APBN 2025 Dijaga Terkendali dalam Batas Aman dengan Defisit 2,53% PDB

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

5,2 %
yoy

2,5 %
yoy

16.000
Rp/US\$

7,0 %
(SUN 10th)

82 US\$
/barrel

605
ribu bph

1.005
bsmph

Uraian (triliun rupiah)	2025		
	APBN	Real s.d. 31 Mar	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	3.005,1	516,1	17,2
a./ I. Penerimaan Perpajakan	2.490,9	400,1	16,1
1. Penerimaan Pajak	2.189,3	322,6	14,7
2. Kepabeanan & Cukai	301,6	77,5	25,7
II. PNBP	513,6	115,9	22,6
B. BELANJA NEGARA	3.621,3	620,3	17,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.701,4	413,2	15,3
1. Belanja K/L	1.160,1	196,1	16,9
2. Belanja non-K/L	1.541,4	217,1	14,1
II. Transfer Ke Daerah	919,9	207,1	22,5
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(63,3)	17,5	(27,7)
D. SURPLUS/ (DEFISIT)	(616,2)	(104,2)	16,9
% thd PDB	(2,53)	(0,43)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	616,2	250,0	40,6

APBN MENJAGA KEBERLANJUTAN ANGGARAN PRIORITAS 2025

Untuk Mendukung Agenda Pembangunan

PENDAPATAN NEGARA

Rp516,1 T

Penerimaan Perpajakan di Maret terjadi *pembalikan trend positif*

BELANJA NEGARA

Rp620,3 T

Belanja terkendali dan dimonitor detail dan merata

Surplus Keseimbangan Primer

Rp17,5 T

DEFISIT APBN

Rp104,2 T
0,43% PDB

Pembiayaan Anggaran dari *issuance* SBN masih menarik investor



PENERIMAAN PAJAK BRUTO S.D. MARET 2025 SEBESAR RP469,91 T

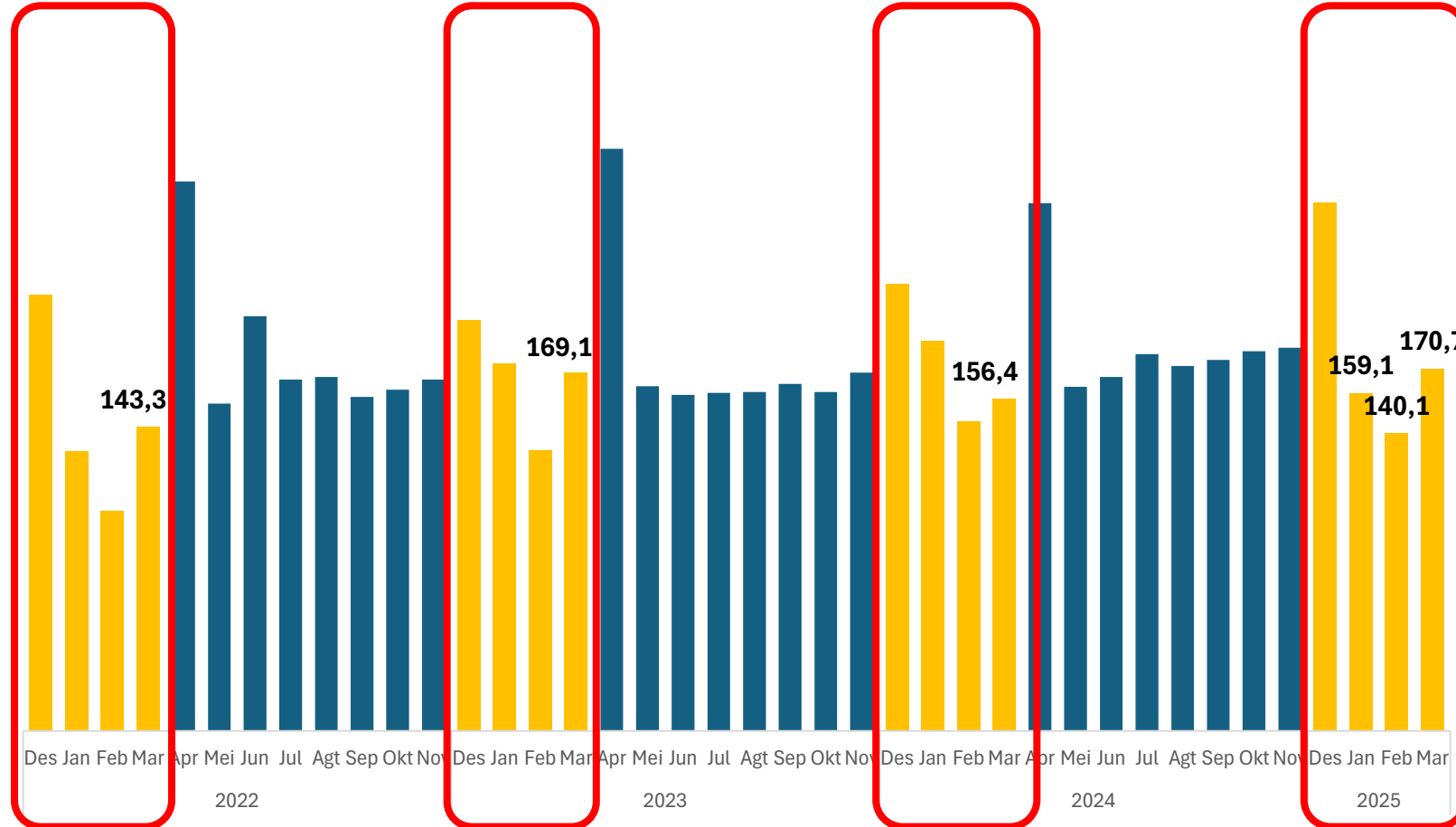
Penerimaan pajak per Maret 2025 (yoy) sudah tumbuh positif

Rata-rata:
Rp 146,1 T

Rata-rata:
Rp 167,1 T

Rata-rata:
Rp 174,2 T

Rata-rata:
Rp 179,7 T



	Pert. Bruto (%, yoy)	Pert. Bruto Kumulatif (% ytd)
Jan	-13,4	-13,4
Feb	-4,0	-9,3
Mar*	9,1	-3,3

* Maret 2025 (Data Sementara)



Penerimaan pajak memiliki tren bulanan yang spesifik, perubahan kebijakan administrasi perpajakan seperti penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh21 dan relaksasi batas waktu administrasi (pembayaran dan pelaporan SPT) mengubah pola tren bulanan ini.



Penerimaan kumulatif Des-24 s.d. Mar-25 menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.



Selain perubahan administrasi, perubahan aktivitas ekonomi dan harga komoditas juga mempengaruhi pola tren bulanan penerimaan perpajakan



BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi s.d. 31 Maret 2025 mencapai **Rp413,2 T** atau **15,3% APBN**
(Tahun 2024 : 17,3% APBN karena adanya pelaksanaan Pemilu dan bantuan pangan)



Belanja K/L Rp196,1 T (16,9% dari Pagu APBN)

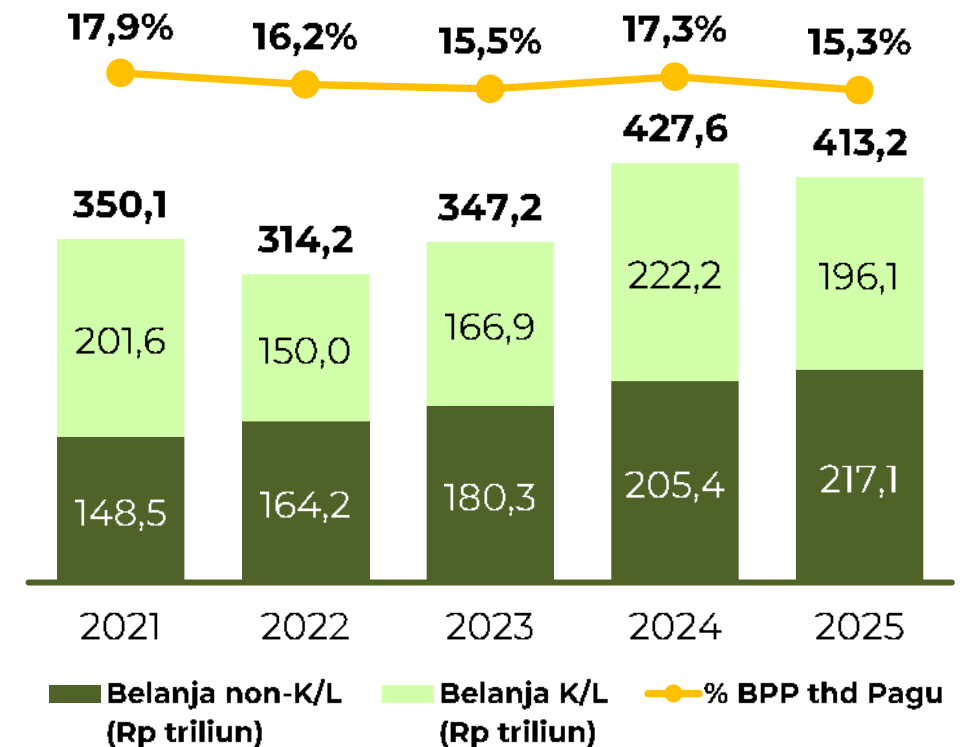
Belanja Pegawai termasuk THR ASN/TNI/Polri serta Bantuan Sosial (a.l. PBI JKN, PKH, Kartu sembako dll) tetap dibayarkan/dialurkan sesuai jadwal



Belanja Non-K/L Rp217,1 T (14,1% dari Pagu APBN)

didukung pembayaran manfaat pensiun termasuk THR, subsidi, dan kompensasi sesuai jadwal

Realisasi BPP s.d 31 Maret, 2021 – 2025
(triliun rupiah)



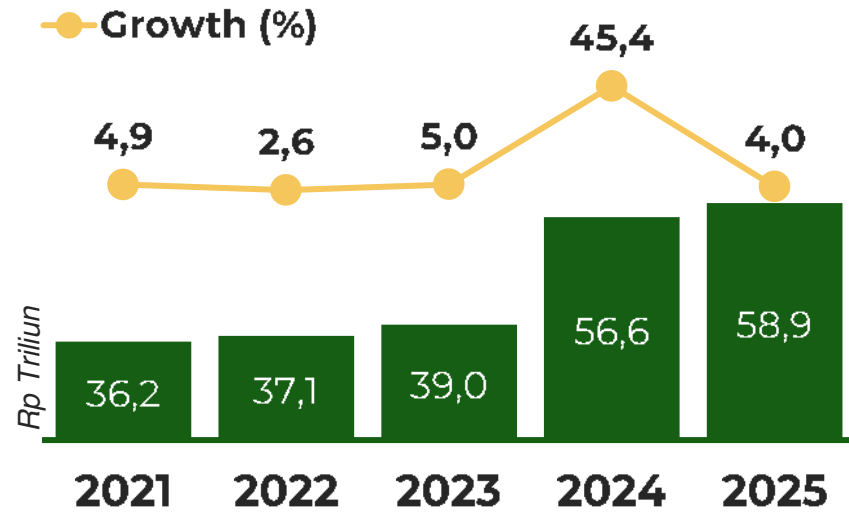


REALISASI BELANJA NON K/L Rp217,1 T

S.D. 31 MARET 2025

Manfaat Pensiun

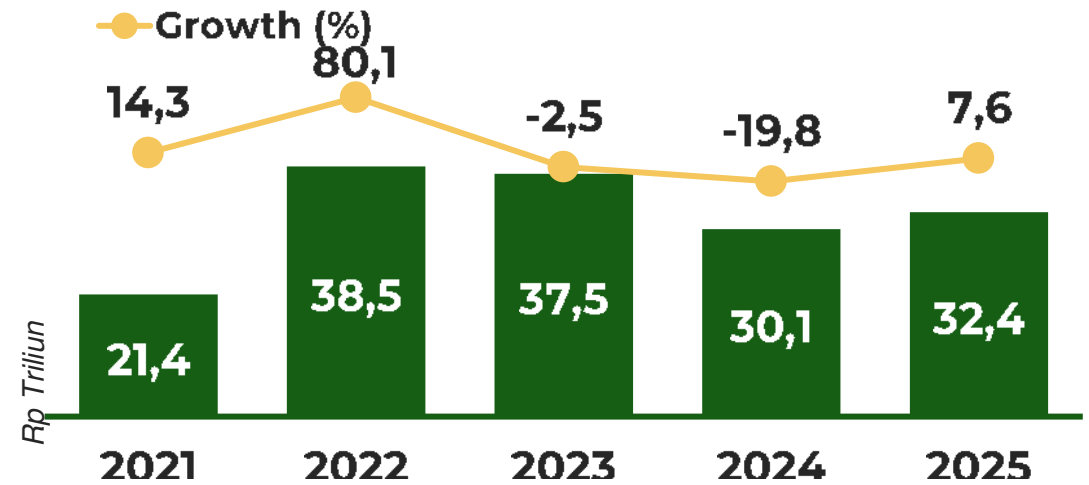
Pembayaran manfaat pensiun termasuk THR sesuai jadwal



Pemanfaatan a.l.	2024	2025	
	Realisasi	Realisasi	Growth (%)
Manfaat Pensiun	56,6	58,9	▲ 4,0
- Taspen	49,7	51,7	▲ 4,1
- Asabri	6,9	7,2	▲ 3,8

Subsidi & Kompensasi

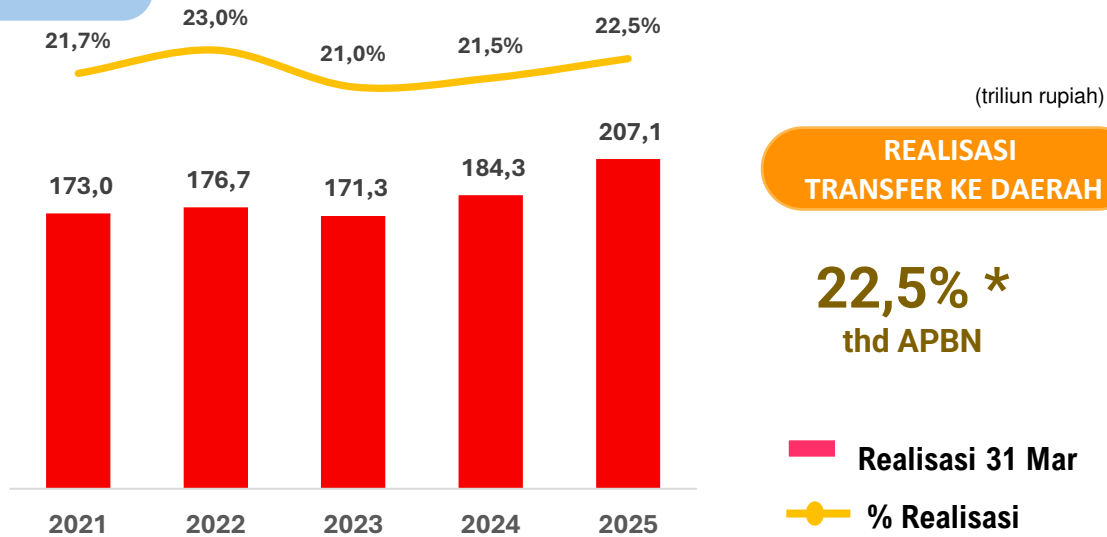
Relisasi subsidi s.d. 31 Maret 2025 berasal dari **Subsidi Energi Rp32,2 T** dan **Subsidi Non-Energi Rp183,9 M**



Pemanfaatan a.l.	2024	2025	
	Realisasi	Realisasi	Growth (%)
BBM (ribu KL)	2.807,9	2.906,8	▲ 3,5%
LPG 3 Kg (juta kg)	1.329,8	1.368,0	▲ 2,9%
Listrik bersubsidi (juta pelanggan)	40,2	41,9	▲ 4,2%
Pupuk (juta ton)	1,3	1,7	▲ 27,7%



REALISASI TRANSFER KE DAERAH LEBIH TINGGI DARI TAHUN SEBELUMNYA, MENUNJUKKAN DUKUNGAN APBN UNTUK PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK DI DAERAH



REALISASI TRANSFER KE DAERAH

22,5% *
thd APBN

Realisasi 31 Mar
% Realisasi

Realisasi TKD per 31 Maret 2025 sebesar **Rp207,1T** atau tersalurkan **22,5% dari pagu**



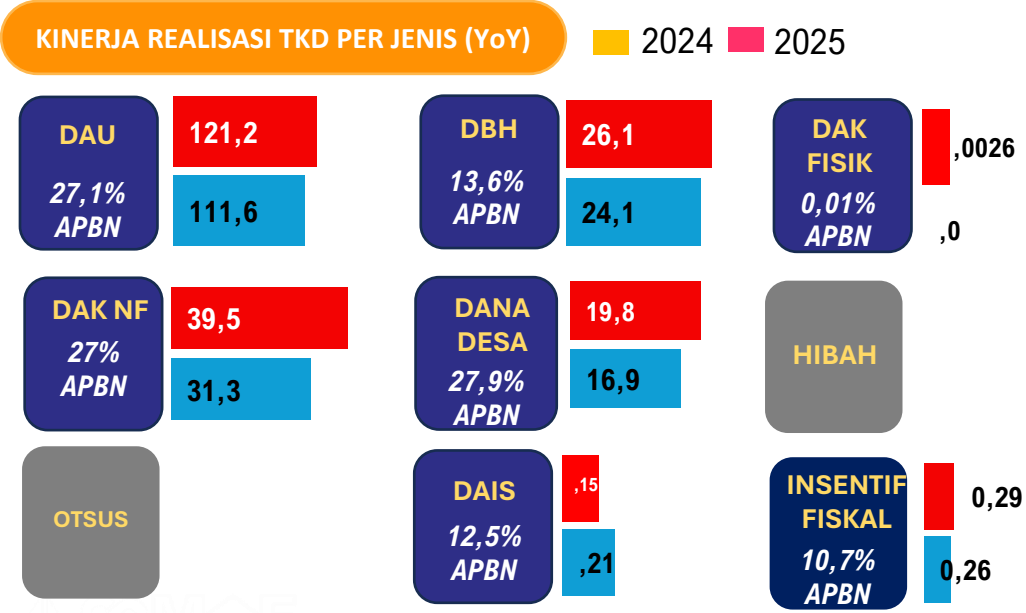
Pada Bulan Maret, TKD dioptimalkan penyalurannya untuk mendukung layanan publik daerah seperti **sekolah dan puskesmas melalui DAK NF BOS dan BOK**, serta mendukung **penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui DAU khususnya untuk mendukung pembayaran THR ASN Daerah**.



Hampir semua jenis TKD mengalami peningkatan realisasinya jika dibandingkan dengan tahun 2024 (DAU, DBH, DAK & Dandes), hal ini dikarenakan adanya peningkatan kinerja daerah dan desa dalam menyampaikan syarat salur



Sebagian dana TKD belum dilakukan penyaluran karena belum terpenuhinya penyampaian persyaratan salur dari Pemerintah Daerah dan/atau belum masuk jadwal penyaluran.



*Pagu TKD sebelum Inpres 1/2025



Pembiayaan APBN 2025: *Prudent*, Terukur, serta Akomodatif terhadap Efisiensi Anggaran dan Dinamika Pasar Keuangan

Realisasi Pembiayaan Anggaran **Rp 250,0 T** (40,6% dari APBN)

PEMBIAYAAN ANGGARAN (triliun rupiah)	2024			2025		
	Perpres 76/2023	Real s.d. Mar	% thd APBN	APBN	Real s.d. Mar	% thd APBN
1. Pembiayaan Utang	648,1	105,6	16,3	775,9	270,4	34,8
a. SBN (Neto)	666,4	104,0	15,6	642,6	282,6	44,0
b. Pinjaman (Neto)	(18,4)	1,6	(8,8)	133,3	(12,3)	(9,2)
2. Pembiayaan Non utang	(125,3)	(20,0)	16,0	(159,7)	(20,4)	12,8
Jumlah	522,8	85,6	16,4	616,2	250,0	40,6

- Pemenuhan **target pembiayaan berjalan *on-track***, dengan ***cost of fund* tetap efisien** dan **risiko yang terus dimitigasi**.
- Penerbitan utang neto dalam kisaran 30% dari target pembiayaan utang neto APBN 2025, dan secara regular dilaksanakan.
- Koordinasi dengan Bank Indonesia terus diperkuat dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mitigasi risiko



STRATEGI KEBIJAKAN: DIARAHKAN MENCIPTAKAN INDONESIA YANG BERDAULAT DALAM JANGKA MENENGAH – PANJANG

Melindungi Tumpah Darah

Menyejahterakan Rakyat

Mencerdaskan Rakyat

1. KETAHANAN PANGAN

Subsidi Pupuk sebanyak **1,3 juta ton** pupuk bersubsidi

2. KETAHANAN ENERGI

- Subsidi BBM **Rp0,8 T** sebanyak **1,5 juta KL**
- Subsidi Listrik **Rp9,8 T** untuk **41,8 juta pelanggan**

3. MAKAN BERGIZI GRATIS

Realisasi **Rp1.057 M**, dengan **2.6 juta** penerima manfaat

4. PROGRAM PENDIDIKAN

- Program KIP Kuliah **Rp156,3 M** untuk **1,1 juta mahasiswa**
- Program PIP Pelajar, LPDP
- BOPTN **Rp348,6 M** untuk **197 lembaga**

5. PROGRAM KESEHATAN

PBI JKN **Rp7,7 T** untuk **96,7 juta peserta**

6. PEMBANGUNAN DESA, KOPERASI, UMKM

- Penyaluran KUR **Rp28,7 T** untuk **0,5 juta debitur**
- **70-80 rb** Koperasi desa merah putih

7. PERTAHANAN SEMESTA

- Modernisasi **Alutsista**,
- Kemandirian **industri pertahanan dalam negeri**

8. PERCEPATAN INVESTASI

Danantara menjadi *driver* pendorong investasi produktif



DANANTARA SEBAGAI PENOPANG INVESTASI DENGAN TATA KELOLA YANG *PRUDENT*, SEKALIGUS ME-LEVERAGE INVESTASI LEBIH TINGGI



Inbreg Aset
Seluruh BUMN

Tata Kelola Investasi dan Operasional

Keputusan investasi melalui proses yang

prudent dan *transparan*

Sistem

Parameter *Return on*

Investment (ROI) yang

jelas

whistleblower

untuk memastikan

bebas korupsi

**Penciptaan Nilai
Tambah Tinggi &
Ketangguhan
Ekonomi**



Hilirisasi Pertambangan

Bauksit
Batu Bara
Gas Bumi
Nikel
Pasir Silika
Tembaga
Besi Baja



return tinggi



Transisi Energi

Bio Fuel
Oil Refinery
Oil Storage Tank



*transfer teknologi &
produktivitas tinggi*



Hilirisasi Pertanian dan Kelautan

Kelapa Sawit
Kelapa
Pala
Udang
Rumput Laut
Tuna
Garam



*penyerapan tenaga
kerja tinggi*



Terima Kasih